

# Pengaruh Sistem Politik terhadap Kebijakan Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Historis (1945–2020)

Hutama Muhammad Anhar

Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

[25061020010@student.upnjatim.ac.id](mailto:25061020010@student.upnjatim.ac.id)

## Abstract

*Economy and politics are two inseparable pillars that profoundly shape the life of a nation. This study examines how changes in Indonesia's political system—from the Old Order (Orde Lama), New Order (Orde Baru), to the Reform Era (Reformasi)—have influenced national economic policies over the period 1945–2020. Using a qualitative historical-comparative approach, this research analyzes primary documents including legislation, state budgets (APBN), and government development plans, alongside academic literature and reports from international institutions. The findings reveal a consistent pattern: shifts in political structure directly reshape the orientation and implementation of economic policy. The authoritarian centralisation of the New Order generated stable growth but entrenched corruption, collusion, and nepotism that ultimately precipitated the 1998 monetary crisis. Conversely, the democratic decentralisation of the Reform Era broadened civic freedoms yet raised political costs and fragmented policy coherence. This study contributes a comprehensive historico-institutional perspective on the politics–economy nexus in Indonesia, offering insights for policymakers and scholars seeking to understand the structural roots of Indonesia's economic trajectory.*

**Keywords:** Economic Policy; Historical Analysis; Indonesian Politics; Political System; State Transformation.

## Abstrak

Ekonomi dan politik adalah dua hal yang saling berkaitan dan sangat memengaruhi hajat hidup orang banyak. Tulisan ini mengkaji bagaimana perubahan sistem politik di Indonesia—dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi—memengaruhi kebijakan ekonomi nasional dalam kurun waktu 1945–2020. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif historis-komparatif, penelitian ini menganalisis dokumen primer berupa peraturan perundang-undangan, APBN, dan rencana pembangunan pemerintah, serta literatur akademik dan laporan lembaga internasional. Temuan menunjukkan bahwa perubahan sistem politik secara konsisten memengaruhi orientasi dan implementasi kebijakan ekonomi. Sentralisasi otoritarian pada era Orde Baru menghasilkan pertumbuhan yang stabil namun melahirkan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang pada akhirnya memicu krisis moneter 1998. Sebaliknya, desentralisasi demokratis pada era Reformasi memperluas kebebasan sipil namun menimbulkan biaya politik yang tinggi dan fragmentasi kebijakan. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa perspektif historis-institusional yang komprehensif mengenai hubungan politik–ekonomi di Indonesia sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dan akademisi.

**Kata Kunci:** Kebijakan Ekonomi; Analisis Historis; Politik Indonesia; Sistem Politik; Transformasi Negara.

## I. PENDAHULUAN

Ekonomi dan politik adalah dua hal yang sangat penting yang memengaruhi hajat hidup orang banyak. Untuk dua hal ini, orang rela melakukan apa saja, baik hal jahat maupun hal baik. Berkat dua hal ini dunia bisa menjadi lebih baik, tetapi juga bisa terpuruk dan jatuh dalam anarki.

Dalam konteks global, ekonomi dunia telah mengalami integrasi yang semakin masif sejak berakhirnya Perang Dunia II. Pendirian institusi

multilateral seperti Bank Dunia, *IMF*, dan *OECD* menjadi tonggak penting yang mendorong konvergensi sistem ekonomi global ke arah kapitalisme, khususnya pasca berakhirnya Perang Dingin (Rickard, 2020). Globalisasi ekonomi yang bergerak progresif ini membawa konsekuensi langsung bagi pilihan-pilihan kebijakan ekonomi yang diambil oleh masing-masing negara, termasuk Indonesia (Kurnia *et al.*, 2024).

Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di Asia Tenggara telah melewati berbagai fase

## Info Artikel

Diterima 12 Mei 2026

Direvisi 17 Mei 2026

Diterima 22 Mei 2026

[25061020010@student.upnjatim.ac.id](mailto:25061020010@student.upnjatim.ac.id)

Copyright©2026. Published by Jurnal Ekonomi dan Sosial (JES) – Lentera Hidup Mulia

perubahan sistem politik yang secara langsung berdampak pada arah kebijakan ekonominya. Dari era Orde Lama yang diwarnai ketidakstabilan, Orde Baru yang otoriter namun membawa pertumbuhan, hingga era Reformasi yang demokratis namun penuh dinamika—setiap perubahan sistem politik meninggalkan jejak nyata pada kebijakan ekonomi yang diterapkan (Farkhan, 2023).

Penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas ekonomi Indonesia maupun sistem politiknya secara terpisah (Akita & Alisjahbana, 2002; Hill, 2000). Namun kajian komprehensif yang menganalisis secara historis-komparatif bagaimana perubahan sistem politik memengaruhi kebijakan ekonomi dari 1945 hingga 2020 masih terbatas. Penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan menggunakan kerangka historis-institusional, sejalan dengan argumen bahwa sistem tata negara memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan politik dan ekonomi (Kemhay, 2024).

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh perubahan sistem politik terhadap orientasi dan implementasi kebijakan ekonomi Indonesia dalam perspektif historis periode 1945–2020, mencakup era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.

## II. KAJIAN TEORI

### 2.1 Ekonomi Politik dan Peran Negara

Ekonomi politik merupakan disiplin interdisipliner yang menggabungkan ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik untuk menjelaskan bagaimana institusi politik, lingkungan politik, serta berbagai sistem ekonomi saling memengaruhi satu sama lain (Maherul, 2019). Dalam perspektif ini, keputusan ekonomi tidak pernah terlepas dari konteks kekuasaan dan kepentingan politik yang melatarbelakanginya. Kemampuan pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada regulasi ekonomi yang ditentukan oleh institusi politiknya — bagaimana institusi politik tersebut mengelola sumber daya kekuasaan sekaligus memenuhi kepentingan publik (Heriyono, 2013).

Negara, sebagai aktor utama, memiliki kapasitas untuk menentukan arah pembangunan ekonomi sesuai dengan ideologi dan sistem politik yang dianutnya. Relasi keduanya bersifat saling ketergantungan: aspek ekonomi menjadi kekuatan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan politik, sementara kekuasaan politik menjadi instrumen pengaturan ekonomi (Ruslin, 2012). Pandangan Karl Polanyi (1957) menegaskan hal ini: perluasan kekuasaan negara dan pasar tidaklah setara, dan pasar tidak dapat mengatur dirinya sendiri tanpa

intervensi politik untuk mencegah konsekuensi sosial yang merusak (dalam Erlina *et al.*, 2019).

Dalam konteks Indonesia, keterkaitan antara stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi terbukti sangat signifikan. Kondisi politik yang stabil akan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memperkuat legitimasi pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi (Farkhan, 2023). Sebaliknya, ketidakstabilan politik — seperti yang terjadi di era Orde Lama — secara langsung mengakibatkan inkonsistensi kebijakan dan kegagalan pembangunan ekonomi.

### 2.2 Teori *Developmental State* (Negara Pembangunan)

Konsep *developmental state* atau negara pembangunan pertama kali diperkenalkan oleh Chalmers Johnson (1982) dalam karyanya *MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925–1975*. Johnson menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi pesat di Jepang ditopang oleh peran aktif negara dalam proses pembangunan, bukan semata-mata mekanisme pasar bebas. Dalam definisi Johnson, *developmental state* adalah negara yang menjadikan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama; melakukan intervensi tidak hanya melalui regulasi tetapi juga secara langsung; memiliki birokrasi publik yang kecil namun sangat terampil; serta mengontrol akun perdagangan dan keuangan luar negeri untuk mengarahkan industrialisasi nasional.

Model ini kemudian diadopsi oleh berbagai negara Asia Timur, termasuk Korea Selatan dan Taiwan, dan menjadi kerangka analisis penting untuk memahami kebijakan ekonomi Indonesia era Orde Baru (Johnson, 1982 dalam Labib & Lila, 2023). Indonesia di bawah Soeharto menunjukkan karakter *developmental state* yang kuat: negara secara aktif mengarahkan investasi, melindungi industri domestik melalui regulasi PMA, merencanakan pembangunan jangka panjang melalui Repelita, dan mendorong industrialisasi berbasis ekspor hingga menjadi bagian dari "*The East Asia Miracle*" pada tahun 1990-an (Rajab, 2022).

Namun demikian, *developmental state* yang terlalu sentralistik mengandung risiko struktural. Pembangunan ekonomi yang dimotori negara dan mampu mendorong pertumbuhan yang tinggi secara sosiologis juga akan mendorong bertambahnya kelas menengah yang pada gilirannya menuntut penghapusan praktik kolusi dan kroni serta penegakan hukum. Inilah kontradiksi internal yang pada akhirnya meruntuhkan Orde Baru pada 1998 (Rajab, 2022).



### 2.3 Teori Institusional Historis

Kerangka institusional historis yang dikembangkan oleh Douglass C. North menjadi landasan penting dalam penelitian ini. North mengembangkan kerangka analitis untuk menjelaskan cara institusi dan perubahan institusional memengaruhi kinerja ekonomi, baik pada suatu waktu tertentu maupun sepanjang waktu. Institusi dapat sangat bervariasi dalam konsekuensinya terhadap kinerja ekonomi: beberapa ekonomi mengembangkan institusi yang menghasilkan pertumbuhan, sementara yang lain mengembangkan institusi yang menghasilkan stagnasi.

Dalam konteks penelitian ini, setiap pergantian sistem politik di Indonesia — dari Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, hingga era Reformasi — menghasilkan perubahan institusional yang secara langsung mengubah "aturan main" kebijakan ekonomi. Institusi politik yang stabil dan akuntabel akan menghasilkan kebijakan ekonomi yang konsisten dan efektif, sementara institusi yang rapuh atau otoriter akan melahirkan kebijakan yang distorsif dalam jangka panjang (North, 1990).

Perspektif ini sejalan dengan temuan Rickard (2020) bahwa geografi ekonomi dan institusi politik berinteraksi untuk memengaruhi kebijakan ekonomi suatu negara. Sistem politik yang berbeda menghasilkan insentif yang berbeda bagi para pengambil kebijakan, yang pada akhirnya membentuk orientasi dan prioritas kebijakan ekonomi yang diterapkan.

### 2.4 Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian telah mengkaji hubungan antara sistem politik dan kebijakan ekonomi Indonesia dari berbagai sudut pandang. Rajab (2022) dalam kajiannya tentang otoritarianisme birokratik Orde Baru menyimpulkan bahwa rezim otoriter secara politik niscaya bersifat represif dan dalam jangka panjang akan melahirkan praktik usaha yang koruptif dan kolusif, yang menjadi akar kejatuhan ekonomi 1998. Sementara itu, Shaleha *et al.* (2024) menganalisis perkembangan kebijakan ekonomi Orde Baru dan menemukan bahwa model ekonomi otoriter-terpusat mampu menghasilkan pertumbuhan pesat namun meninggalkan kesenjangan sosial dan ketergantungan struktural yang dalam.

Dari sisi era Reformasi, Kemhay (2024) menyoroti bahwa desentralisasi politik pasca-1998 membawa tantangan koordinasi vertikal dan horizontal yang berdampak pada efektivitas implementasi kebijakan ekonomi di daerah. Farkhan (2023) secara spesifik menemukan korelasi positif

antara stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana ketidakstabilan politik secara langsung berdampak negatif terhadap iklim investasi dan konsistensi kebijakan. Kurnia *et al.* (2024) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa kebijakan politik berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi secara bersamaan.

Dari perspektif perbandingan lintas negara, dua studi internasional bereputasi memberikan konteks yang relevan bagi temuan penelitian ini.

Perkins (2021) menggunakan pendekatan ekonomi politik komparatif untuk menganalisis faktor-faktor politik di balik kesenjangan pembangunan di Asia Tenggara. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa stabilitas politik jangka panjang menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun pengalaman pembangunan antarnegara di kawasan ini sangat bervariasi. Secara lebih spesifik, Perkins (2021) menyimpulkan bahwa alasan utama variasi tersebut adalah karena enam negara di kawasan mengalami gangguan besar akibat instabilitas dan ekstremisme politik, termasuk perang, pemerintahan kleptokratik, dan pemimpin yang lebih mementingkan ideologi daripada pertumbuhan ekonomi. Temuan ini selaras dengan pengalaman Indonesia di era Orde Lama dan fase kritis 1997–1998.

Di sisi lain, Rithmire (2023) dalam *Precarious Ties: Business and the State in Authoritarian Asia* secara khusus membandingkan hubungan negara dan bisnis di Indonesia di bawah Orde Baru Soeharto, Malaysia di bawah Barisan Nasional, dan China di bawah Partai Komunis. Rithmire mengajukan dua model konseptual relasi negara-bisnis di bawah rezim otoriter: *mutual alignment* dan *mutual endangerment*, untuk menjelaskan mengapa beberapa kemitraan antara elite politik dan bisnis menghasilkan pertumbuhan yang stabil sementara yang lain justru berujung pada krisis. Kasus Indonesia di bawah Soeharto dikategorikan dalam pola *mutual endangerment* — relasi yang dibangun atas dasar ketidakpercayaan struktural antara negara dan modal — yang menjelaskan mengapa pertumbuhan Orde Baru tidak tahan uji ketika krisis moneter 1998 melanda.

Kedua studi internasional tersebut memperkuat argumen penelitian ini bahwa jenis dan kualitas sistem politik — bukan hanya ada atau tidaknya stabilitas — merupakan penentu kritis orientasi dan ketahanan kebijakan ekonomi, khususnya di negara-negara berkembang Asia.



Dari telaah berbagai penelitian terdahulu tersebut, teridentifikasi gap penelitian yang signifikan: belum ada kajian yang secara komprehensif menganalisis ketiga era sekaligus — Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi — dalam satu kerangka historis-komparatif yang utuh untuk memetakan pola sistemik hubungan sistem politik dan kebijakan ekonomi Indonesia sepanjang 1945–2020.

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan perspektif historis-institusional sebagai kerangka analisis, dengan memadukan teori ekonomi politik, konsep *developmental state*, dan teori institusional North. Perubahan sistem politik diperlakukan sebagai variabel yang memengaruhi orientasi kebijakan ekonomi melalui dua jalur: pertama, melalui perubahan struktur insentif bagi para pengambil kebijakan; dan kedua, melalui perubahan kapasitas negara dalam merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi secara efektif.

## III. METODE PENELITIAN

### 3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi historis-komparatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan mengungkap fenomena secara holistik-kontekstual — yakni bagaimana perubahan sistem politik memengaruhi kebijakan ekonomi Indonesia — yang tidak dapat diukur melalui prosedur statistik semata, melainkan membutuhkan pemahaman mendalam atas makna, proses, dan konteks historis yang melatarbelakanginya (Creswell, 2021; Sugiyono, 2019). Secara spesifik, metode historis-komparatif digunakan karena penelitian ini mengutamakan aspek waktu dalam lintasan sejarah dan melakukan perbandingan antara periode-periode berbeda untuk melihat perkembangan serta pengaruh perubahan institusional yang terjadi (Karyanta, Suryanto, & Hendriani, 2020).

### 3.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua kategori sumber data. Pertama, data primer berupa dokumen kebijakan resmi pemerintah Indonesia, meliputi undang-undang (antara lain UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA, UU tentang Kepailitan dan Anti Monopoli, UU Otonomi Daerah, UU tentang KPK, UU tentang JPSK, dan UU Cipta Kerja), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari berbagai era, Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita I–

VI), dekrit dan ketetapan presiden, serta dokumen perencanaan pembangunan nasional seperti RPJMN. Kedua, data sekunder berupa literatur akademik (buku, artikel jurnal nasional dan internasional), laporan resmi lembaga internasional seperti Bank Dunia dan *IMF*, serta sumber berita dan dokumen sejarah yang telah terverifikasi (Creswell, 2021).

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis berupa buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga resmi, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan topik penelitian (Assyakurrohim *et al.*, 2023). Analisis dokumen dipilih sebagai teknik utama karena merupakan sumber bukti yang unik dalam penelitian historis yang tidak selalu dapat diperoleh melalui teknik lain (Creswell, 2021). Pengumpulan data difokuskan pada tiga era utama: Orde Lama (1945–1967), Orde Baru (1967–1998), dan era Reformasi (1998–2020).

### 3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan dua teknik yang saling melengkapi. Pertama, analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk mengidentifikasi orientasi dan muatan kebijakan ekonomi pada setiap dokumen yang dianalisis (Martono, 2014). Kedua, analisis historis-komparatif diterapkan untuk membandingkan pola hubungan antara sistem politik dan arah kebijakan ekonomi pada ketiga era secara sistematis, guna mengidentifikasi kemiripan, perbedaan, dan pola yang bersifat lintas-waktu (Karyanta, Suryanto, & Hendriani, 2020). Proses analisis mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang mencakup tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.

### 3.5 Validitas Penelitian

Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber data, yakni dengan melakukan pengecekan silang antara dokumen kebijakan primer, literatur akademik, dan laporan lembaga internasional untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan (Sugiyono, 2019). Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari sumber yang berbeda mengenai fakta dan kondisi yang sama pada setiap era, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya bertumpu pada satu jenis sumber (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Dengan triangulasi ini, bias interpretasi dapat diminimalkan dan keabsahan data





penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Era Orde Lama (1945–1967): Instabilitas Politik dan Kegagalan Kebijakan Ekonomi

Pasca kemerdekaan, kondisi ekonomi Indonesia sangat buruk. Sebagai negara baru, inflasi sangat tinggi karena berlakunya tiga mata uang secara bersamaan: mata uang *De Javasche Bank*, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang Jepang. Selain itu, sejak kedatangan NICA ke tanah air, mereka juga memberlakukan mata uang sendiri di wilayah yang dikuasai. Untuk mengatasi hal tersebut, pada 30 Oktober 1946 pemerintah mengeluarkan Oeang Republik Indonesia (ORI) yang kita kenal sebagai Rupiah. Kondisi ini diperburuk oleh blokade ekonomi Belanda sejak November 1945 yang menutup pintu perdagangan internasional Indonesia (Shodiq & Maula, 2025).

Berbagai upaya dilakukan untuk menstabilkan ekonomi pada masa awal kemerdekaan, antara lain: Program Pinjaman Nasional (Juli 1946), diplomasi beras ke India, Konferensi Ekonomi Februari 1946, pembentukan *Planning Board* (19 Januari 1947), Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (RERA) 1948, serta *Kasimo Plan* yang berfokus pada swasembada pangan. Namun berbagai upaya tersebut belum mampu mengatasi krisis secara mendasar akibat ketidakstabilan politik yang terus-menerus (Shodiq & Maula, 2025).

Pada periode Demokrasi Liberal (1950–1959), sistem ekonomi Indonesia diserahkan pada mekanisme pasar sesuai prinsip *laissez faire*. Namun pengusaha pribumi yang masih lemah tidak mampu bersaing dengan pengusaha nonpribumi. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh antara lain: Gunting Syarifuddin (1950) untuk menekan jumlah uang beredar, Program Benteng untuk menumbuhkan wirausahawan pribumi, nasionalisasi *De Javasche Bank* menjadi Bank Indonesia (1951) melalui UU No. 24 Tahun 1951, serta sistem ekonomi Ali-Baba yang menggalang kerja sama antara pengusaha Tionghoa dan pribumi. Keseluruhan kebijakan ini gagal memperbaiki kondisi ekonomi secara fundamental, karena pengusaha pribumi belum cukup berpengalaman dan sistem berganti terlalu cepat mengikuti pergantian kabinet (Rakhman & Hidayat, 2022).

Memasuki era Demokrasi Terpimpin (1959–1967) melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sistem ekonomi bergeser ke arah etatisme yang terinspirasi sosialisme. Pemerintah menerapkan devaluasi rupiah

(25 Agustus 1959), pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon), serta redenominasi pada 13 Desember 1965 yang menjadikan Rp 1.000 setara Rp 1 baru — namun di masyarakat hanya dihargai 10 kali lipat, sehingga justru memperparah inflasi (Soesilo, 2000 dalam Shodiq & Maula, 2025). Pengeluaran besar untuk proyek mercusuar seperti *Asian Games 1962*, pembangunan Monas, Masjid Istiqlal, dan Senayan, serta biaya operasi Trikora dan Dwikora yang dibiayai utang Soviet turut memperburuk neraca fiskal. Pada akhir era Orde Lama, inflasi mencapai 500–600% dan APBN tidak dikelola secara sehat (Soesilo, 2000 dalam Rakhman & Hidayat, 2022).

Kegagalan kebijakan ekonomi di era Orde Lama secara konsisten menunjukkan bahwa instabilitas dan eksperimen sistem politik — pergantian kabinet yang terlalu cepat di era liberal serta konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di era terpimpin — secara langsung menghambat konsistensi dan efektivitas kebijakan ekonomi. Hal ini sejalan dengan temuan Shodiq dan Maula (2025) bahwa perubahan paradigma perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika kebijakan dan kondisi politik yang berlaku pada masing-masing era.

##### 4.2 Era Orde Baru (1967–1998): Sentralisasi Politik dan Stabilitas Ekonomi

Pada awal Orde Baru, pemerintah mewarisi kondisi ekonomi yang sangat buruk. Melihat bahwa sistem ekonomi liberal maupun sosialis tidak cocok bagi Indonesia, pemerintah memilih sistem Demokrasi Pancasila dengan campur tangan pemerintah yang terbatas dan terukur. Prioritas pertama adalah stabilisasi ekonomi dan rehabilitasi, ditandai dengan penerbitan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai dasar hukum investasi asing, serta restrukturisasi utang dengan para kreditur melalui pembentukan *Consultative Group on Indonesia (CGI)* (Setia, 2023 dalam Shaleha *et al.*, 2024).

Iklim ekonomi dan pembangunan menjadi lebih terarah berkat penerapan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita I (1969–1974) berfokus pada pertumbuhan dan penurunan inflasi; Repelita II (1974–1979) pada pertanian dan industri; Repelita III (1979–1984) pada Trilogi Pembangunan; Repelita IV (1984–1989) berhasil mengantarkan Indonesia pada swasembada beras dengan produksi 25,8 juta ton, mendapatkan pengakuan FAO-PBB; Repelita V (1989–1994) memantapkan swasembada pangan dan penyerapan tenaga kerja; dan Repelita VI (1994–1998) berfokus pada industri dan pertanian (Rahmawati, 2022; Pratiwi, 2024). Kebijakan



ekonomi diarahkan pada 8 Jalur Pemerataan: kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi perempuan dan generasi muda, penyebaran pembangunan, serta peradilan (Shaleha *et al.*, 2024).

Hasilnya sangat signifikan: swasembada beras tercapai pada 1984, angka kemiskinan menurun drastis, partisipasi pendidikan meningkat, angka kematian bayi turun, dan industrialisasi meningkat pesat. Ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata di atas 6% per tahun dan Indonesia diakui sebagai bagian dari *'The East Asia Miracle'* pada dekade 1990-an (Pratiwi, 2024). Program Keluarga Berencana (KB) juga berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk secara signifikan (Shaleha *et al.*, 2024).

Namun, di balik pencapaian tersebut, sentralisasi kekuasaan pada poros Golkar-ABRI-Pemerintah menumbuhkan konglomerasi yang sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sekitar 70% ekonomi dikendalikan pemerintah dan kroni-kroninya. Pembangunan yang terlalu sentralistik mengakibatkan kesenjangan tajam antar daerah dan antar golongan, serta penumpukan utang luar negeri. Infrastruktur transportasi di luar Jawa sangat tertinggal, memicu urbanisasi massal dan menciptakan persepsi bahwa pembangunan hanya untuk Pulau Jawa (Rajab, 2022).

Titik nadir terjadi ketika krisis moneter Asia 1997–1998 melanda. Fondasi ekonomi yang rapuh akibat KKN dan lemahnya pengawasan sektor keuangan tidak mampu menahan imbas krisis. Harga-harga melonjak drastis, nilai tukar rupiah melemah tajam, dan pertumbuhan ekonomi merosot menjadi minus 13,13%. Negara-negara donor *CGI* menarik diri, dan Indonesia terpaksa menandatangani kesepakatan dengan *IMF* (Shaleha *et al.*, 2024). Krisis multidimensi yang ditimbulkan akhirnya menjatuhkan pemerintahan Orde Baru. Rajab (2022) menegaskan bahwa rezim otoriter secara niscaya bersifat represif dan dalam jangka panjang akan melahirkan praktik usaha yang koruptif dan kolusif, yang menjadi akar kejatuhan ekonomi 1998.

#### 4.3 Era Reformasi (1998–2020): Demokratisasi dan Desentralisasi Ekonomi

Reformasi ditandai dengan berkurangnya dominasi pemerintah dan ABRI atas kehidupan berbangsa. Di bawah Presiden B.J. Habibie, dikeluarkan UU tentang Kepailitan dan Anti Monopoli, serta Bank Indonesia memperoleh status independennya. Kebijakan keuangan dan moneter yang ditempuh membawa kebangkitan ekonomi: kurs

rupiah menguat dari Rp 16.650 per dolar AS (Juni 1998) menjadi Rp 7.000 per dolar AS (November 1998). Selain itu, kebijakan *social safety net* diperkenalkan untuk melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan terdampak krisis (Dzaki *et al.*, 2024).

Pada era Presiden Abdurrahman Wahid, pemerintah menerapkan desentralisasi fiskal dan pembangunan melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah — yang menjadi tonggak awal otonomi daerah di Indonesia. Desentralisasi fiskal ini diakui secara global sebagai salah satu keberhasilan tata kelola bagi negara sebesar dan seberagam Indonesia (Kemenkeu, 2021 dalam Kurnia *et al.*, 2024). Namun Kemhay (2024) mencatat bahwa desentralisasi juga membawa tantangan koordinasi vertikal dan horizontal yang berdampak pada efektivitas implementasi kebijakan ekonomi di daerah.

Pada era Presiden Megawati, langkah pemberantasan korupsi diperkuat dengan pembentukan KPK melalui UU No. 30 Tahun 2002. Penjualan aset BUMN dilakukan untuk menstabilkan APBN yang masih defisit. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ekonomi Indonesia tumbuh stabil di atas 6% — pada 2012 Indonesia bahkan menjadi anggota G20 dengan pertumbuhan ekonomi tercepat kedua setelah China. Krisis ekonomi global 2008 sempat memperlambat laju pertumbuhan, namun Indonesia mampu melewatinya dengan lebih baik berkat UU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang ditetapkan di era SBY (Bintoro, 2020 dalam Shodiq & Maula, 2025).

Pada masa Presiden Joko Widodo, struktur APBN dirombak dengan lebih mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur secara merata — termasuk di kawasan timur Indonesia dan daerah tertinggal. Mekanisme perizinan diperbaiki *melalui Online Single Submission (OSS)* dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mempermudah investasi. Pada 1 Juli 2020, Bank Dunia memutuskan Indonesia naik kelas menjadi negara berpenghasilan menengah tinggi dengan GNI per kapita sebesar 4.050 dolar AS, sedikit di atas ambang batas 4.046 dolar AS (World Bank, 2020 dalam Dzaki *et al.*, 2024). Kelas menengah Indonesia pada saat itu mencapai sekitar 52 juta orang.

Meski demikian, era Reformasi juga menghadapi tantangan serius. Biaya politik yang sangat tinggi di era demokrasi multipartai dan pilkada langsung mendorong munculnya praktik korupsi di berbagai level pemerintahan, baik pusat maupun



daerah. UU Cipta Kerja yang disahkan pada 2020 diharapkan membawa angin segar bagi investasi dan pertumbuhan, namun masih menghadapi polemik terkait klaster ketenagakerjaan. Ketidakpastian ekonomi global — termasuk perang dagang AS-China dan pandemi COVID-19 — turut menghambat pencapaian target pertumbuhan 7% yang dicanangkan (Dzaki *et al.*, 2024; Farkhan, 2023).

4.4 Analisis Komparatif: Pola Hubungan Sistem Politik–Kebijakan Ekonomi Indonesia

Dari analisis ketiga era yang dikaji, tampak pola yang konsisten: perubahan sistem politik secara langsung mengubah orientasi dan implementasi kebijakan ekonomi Indonesia. Tabel 1 berikut menyajikan ringkasan komparasi sistematis ketiga era tersebut.

Tabel 1. Komparasi Sistem Politik dan Kebijakan Ekonomi Indonesia (1945–2020)

| Aspek                   | Orde Lama (1945–1967)                                                |                                  | Orde Baru (1967 - 1998)                                                                 | Era Reformasi (1998 – 2020)                                                           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistem Politik          | Demokrasi Liberal (1950–59)                                          | →                                | Otoritarianisme terpusat; Golkar–ABRI–Pemerintah; Dwifungsi ABRI                        | Demokrasi multipartai; Pilpres & Pilkada langsung; Otonomi Daerah                     |
| Orientasi Ekonomi       | <i>Laissez faire (liberal)</i>                                       | →                                | Etatisme/sosialisme (terpimpin)                                                         | Demokrasi Pancasila; pasar dengan desentralisasi fiskal dan perlindungan UMKM         |
| Kebijakan Ekonomi Utama | ORI, Syarifuddin, Program Nasionalisasi Bank, Sistem Ali-Baba, Dekon | Gunting Benteng, Ali-Baba, Dekon | UU PMA No.1/1967, Repelita I–VI, 8 Jalur Pemerataan, Program KB, swasembada beras       | UU Kependudukan, BI, Otoda, KPK, JPSK, OSS, PTSP, UU Cipta Kerja                      |
| Capaian Positif         | Pendirian Indonesia; 1955                                            | Bank Pemilu (paling demokratis)  | Swasembada beras (1984); <i>The East Asia Miracle</i> ; pertumbuhan rata-rata 6%+/tahun | Kelas menengah 52 juta orang; naik kelas <i>upper-middle income</i> (2020); KPK aktif |
| Kegagalan /Tantangan    | Inflasi 500–600%; APBN defisit; kebijakan tidak konsisten; mercusuar |                                  | KKN sistemik; 70% ekonomi dikuasai                                                      | Biaya politik tinggi; korupsi daerah pasca desentralisasi;                            |

|                               |                                                                    |                                                                                            |                                                                               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                    | kroni; krisis moneter 1998; kesenjangan antarwilayah                                       | fragmentasi kebijakan                                                         |
| Pola Hubungan Politik–Ekonomi | Instabilitas politik → inkonsistensi kebijakan → kegagalan ekonomi | Stabilisasi politik otoriter → pertumbuhan pesat, tetapi non-akuntabel → krisis struktural | Liberalisasi politik → desentralisasi ekonomi, tetapi biaya koordinasi tinggi |
| Sitasi Kunci                  | Rakhman & Hidayat (2022); Soesilo (2000); Shodiq & Maula (2025)    | Shaleha <i>et al.</i> (2024); Pratiwi (2024); Rajab (2022); Rahmawati (2022)               | Dzaki <i>et al.</i> (2024); Kemhay (2024); Farkhan (2023)                     |

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (Shodiq & Maula, 2025; Shaleha *et al.*, 2024; Rajab, 2022; Dzaki *et al.*, 2024; Farkhan, 2023; Kemhay, 2024

Dari Tabel 1 terlihat bahwa tidak ada satu sistem politik pun yang secara otomatis menjamin keberhasilan kebijakan ekonomi. Demokrasi Liberal menghasilkan kebebasan politik tetapi ketidakstabilan pemerintahan yang sangat tinggi; Demokrasi Terpimpin menghasilkan sentralisasi yang justru memperbesar defisit dan inflasi; Orde Baru yang otoriter berhasil menciptakan pertumbuhan tetapi membangun fondasi yang rapuh; sementara Reformasi yang demokratis membuka kebebasan namun menaikkan biaya koordinasi kebijakan (Shodiq & Maula, 2025; Rajab, 2022).

Pola yang paling mencolok adalah bahwa kualitas institusi politik — bukan sekadar jenis sistem politiknya — merupakan faktor penentu utama efektivitas kebijakan ekonomi. Orde Baru menunjukkan bahwa stabilisasi yang dipaksakan tanpa akuntabilitas akan melahirkan kerentanan struktural. Sebaliknya, era Reformasi menunjukkan bahwa demokratisasi tanpa penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberantasan korupsi yang konsisten akan memunculkan biaya ekonomi yang tidak sedikit. Temuan ini sejalan dengan argumen Perkins (2021) bahwa instabilitas dan ekstremisme politik — bukan hanya jenis rezimnya — adalah penyebab utama kegagalan pembangunan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara.

Lebih jauh, pola hubungan antara sistem politik dan kebijakan ekonomi Indonesia juga memperlihatkan karakter *path dependence* atau



ketergantungan pada lintasan sejarah (North, 1990): setiap era mewarisi distorsi dan permasalahan struktural dari era sebelumnya. Orde Baru mewarisi hiperinflasi dan hutang dari Orde Lama; Reformasi mewarisi KKN struktural dan kelemahan lembaga keuangan dari Orde Baru. Hal ini memperkuat pentingnya membangun institusi politik yang kuat, transparan, dan akuntabel sebagai prasyarat keberhasilan kebijakan ekonomi jangka panjang (North, 1990; Rithmire, 2023).

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pengaruh perubahan sistem politik terhadap orientasi dan implementasi kebijakan ekonomi Indonesia dalam perspektif historis periode 1945–2020, mencakup era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Berdasarkan analisis historis-komparatif yang telah dilakukan, terdapat tiga kesimpulan utama.

Pertama, setiap perubahan sistem politik di Indonesia secara konsisten mengubah orientasi kebijakan ekonomi yang diterapkan. Di era Orde Lama, instabilitas sistem politik — baik berupa pergantian kabinet yang terlalu cepat di era Demokrasi Liberal maupun konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di era Demokrasi Terpimpin — menghasilkan kebijakan ekonomi yang tidak konsisten, berujung pada hiperinflasi 500–600% dan kegagalan pembangunan yang sistemik (Rakhman & Hidayat, 2022; Shodiq & Maula, 2025). Di era Orde Baru, sentralisasi kekuasaan politik pada poros Golkar–ABRI–Pemerintah menciptakan stabilitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6% per tahun dan mengantarkan Indonesia ke dalam kategori *'The East Asia Miracle'*, namun fondasi yang rapuh akibat KKN dan lemahnya pengawasan sektor keuangan membuat seluruh pencapaian itu runtuh dalam krisis moneter 1998 (Shaleha *et al.*, 2024; Rajab, 2022). Di era Reformasi, demokratisasi dan desentralisasi membuka ruang partisipasi yang lebih luas dan mengantarkan Indonesia naik kelas menjadi negara berpenghasilan menengah tinggi pada 2020, namun juga menimbulkan biaya politik yang tinggi dan fragmentasi kebijakan yang menghambat konsistensi pembangunan (Dzaki *et al.*, 2024; Farkhan, 2023; Kemhay, 2024).

Kedua, pola yang paling konsisten dari ketiga era adalah bahwa kualitas institusi politik — bukan sekadar jenis sistem politiknya — merupakan faktor penentu utama efektivitas kebijakan ekonomi. Baik

sistem otoriter maupun demokratis dapat menghasilkan kebijakan ekonomi yang baik atau buruk, bergantung pada kualitas tata kelola, akuntabilitas, dan kapasitas birokrasi yang menyertainya. Temuan ini sejalan dengan kerangka institusional-historis North (1990) dan didukung oleh temuan komparatif Perkins (2021) serta Rithmire (2023) bahwa instabilitas dan ketidakakuntabilisan institusi politik adalah akar permasalahan kegagalan pembangunan ekonomi di negara-negara Asia.

Ketiga, penelitian ini menemukan karakter *path dependence* atau ketergantungan pada lintasan sejarah dalam perkembangan kebijakan ekonomi Indonesia: setiap era mewarisi distorsi struktural dari era sebelumnya. Orde Baru mewarisi hiperinflasi dan utang dari Orde Lama; Reformasi mewarisi KKN struktural dan kelembagaan keuangan yang lemah dari Orde Baru. Hal ini menegaskan pentingnya membangun institusi politik yang kuat, transparan, dan akuntabel sebagai prasyarat mutlak keberhasilan kebijakan ekonomi jangka panjang (North, 1990; Rickard, 2020).

### 5.2 Implikasi

Temuan penelitian ini memiliki dua implikasi penting. Bagi pengambil kebijakan, hasil penelitian ini menekankan bahwa reformasi ekonomi yang berkelanjutan harus selalu diiringi dengan penguatan kelembagaan politik — khususnya pemberantasan korupsi, peningkatan kapasitas birokrasi, dan pembenahan desentralisasi fiskal — agar kebijakan ekonomi yang dirancang dapat diimplementasikan secara efektif dan konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Bagi akademisi, penelitian ini memberikan kontribusi berupa kerangka analisis historis-institusional yang komprehensif untuk memahami relasi politik-ekonomi di Indonesia, yang dapat digunakan sebagai titik tolak penelitian lebih lanjut.

### 5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, penelitian ini menyampaikan saran sebagai berikut.

Pertama, bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar kajian dilakukan secara lebih sektoral dan mendalam, misalnya mengkaji pengaruh perubahan sistem politik terhadap kebijakan ekonomi di sektor manufaktur, pertanian, atau keuangan secara spesifik. Kajian komparatif dengan negara-negara ASEAN lain yang memiliki lintasan sejarah politik-ekonomi serupa — seperti Malaysia, Thailand, atau Filipina — juga sangat direkomendasikan untuk memperkuat generalisasi temuan (Perkins, 2021; Rithmire, 2023).





Kedua, bagi pemerintah, penelitian ini merekomendasikan agar penguatan institusi politik dan ekonomi — termasuk reformasi birokrasi, penguatan KPK, pembenahan tata kelola desentralisasi fiskal, dan pengembangan sistem pengawasan kebijakan yang setara dengan Repelita di era Orde Baru namun lebih akuntabel dan partisipatif — dijadikan prioritas utama dalam setiap siklus perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang.

Ketiga, bagi akademisi dan lembaga pendidikan, penelitian ini menekankan pentingnya literasi ekonomi-politik sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan, agar generasi muda memahami keterkaitan erat antara pilihan sistem politik dan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat luas (Farkhan, 2023; Kurnia *et al.*, 2024).

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Akita, T., & Alisjahbana, A. S. (2002). Regional income inequality in Indonesia and the initial impact of the economic crisis. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 38(2), 201–222. <https://doi.org/10.1080/000749102320145057>
- Assyakurrohim, D., Ikham, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, 3(1), 1–9.
- Bintoro, B. (2020). Kebijakan politik ekonomi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. *Jurnal Ilmu Sosial*, 21(1), 1–9.
- Creswell, J. W. (2021). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran* (Edisi Indonesia). Pustaka Pelajar.
- Dzaki, M. A., Ribawati, E., Rahmawati, R., & Al-Haris, A. D. (2024). Kondisi sosial ekonomi Indonesia pada masa Reformasi. *Cendekia Pendidikan*, 5(5), 1–10.
- Erlina, E., Alfitri, A., & Yanti, M. (2019). Keterlekatan perilaku ekonomi dalam hubungan sosial pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Palembang Square Mall. *Jurnal Media Sosiologi*, 22(1), 66–77. <http://jms.fisip.unsri.ac.id/index.php/jms/article/view/22>
- Farkhan, M. (2023). Analisis keterkaitan antara stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. *Literacy Notes*, 1(2), 1–13.
- Heriyono. (2013). *Ekonomi politik dalam bisnis*. Jurnal Ekonomi, 1.
- Hill, H. (2000). *The Indonesian economy* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Johnson, C. (1982). *MITI and the Japanese miracle: The growth of industrial policy, 1925–1975*. Stanford University Press.
- Karyanta, N. A., Suryanto, S., & Hendriani, W. (2020). Menggunakan metode historis komparatif dalam penelitian psikologi. *Jurnal Psikologi Sosial*, 18(2), 142–155. <http://jps.ui.ac.id/index.php/jps/article/view/jps.2020.15>
- Kemhay, H. (2024). Stabilitas politik pemerintah lokal dalam implementasi desentralisasi di Indonesia (relasi vertikal dan horisontal). *Jurnal Government of Archipelago (JGOA)*, 7(2), 9–22.
- Kurnia, A. D., Zuroida, M., Ikhsaniyah, S. N., Ebensher, Y. K., & Puspita, A. M. I. (2024). Peran politik dalam dinamika ekonomi: Pengaruh kebijakan politik terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 222–228. <https://doi.org/10.62017/merdeka>
- Labib, F., & Lila, S. A. (2023). The influence of political stability on Indonesia's grOSS domestic product. *Asian Economic and Business Development*, 6(1), 31–35. <https://jurnal.stiekn.ac.id/index.php/aebd/article/view/430>
- Maherul, Mursal. (2019). “Mengenal Ekonomi Politik: Definisi, Posisi Negara, Dan Pasar,” 1–10.
- Martono, N. (2014). *Metode penelitian kuantitatif: Analisis isi dan analisis data sekunder* (Cet. 4). Rajawali Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- Perkins, D. (2021). Understanding political influences on Southeast Asia's development experience. *Fulbright Review of Economics and Policy*, 1(1), 4–20. <https://doi.org/10.1108/FREP-03-2021-0021>
- Pratiwi, M. Y. (2024). Perkembangan sistem ekonomi pada masa Orde Baru (Rezim Soeharto) terhadap sektor perekonomian Indonesia. *Historia Vitae*, 4(1), 79–88.
- Rajab, B. (2022). Otoritarianisme-birokratik Orde Baru, krisis ekonomi dan politik, dan demokrasi formal masa Reformasi. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 8(1), 59–78. <https://doi.org/10.20473/jpi.v8i1>



- Rakhman, A. S., & Hidayat, A. (2022). Kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965). *Kebijakan Ekonomi Soekarno Pada Masa Ekonomi Terpimpin*, 5(1), 1–10.
- Rahmawati, R. (2022). Repelita: Sejarah pembangunan nasional di era Orde Baru. *Etnohistori*, 9(2), 36–42.
- Rickard, S. J. (2020). Economic geography, politics, and policy. *Annual Review of Political Science*, 23, 187–202. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-050718-033649>
- Rithmire, M. (2023). *Precarious ties: Business and the state in authoritarian Asia*. Oxford University Press.
- Ruslin. (2012). Relasi ekonomi politik dalam perspektif dependencia. *Sulesana*, 7(2).
- Setia, N. (2023). Keterlibatan Amerika Serikat dalam upaya pembangunan ekonomi Indonesia era Soeharto 1966–1980. *Journal of Indonesian History*, 11(1), 44–54. <https://journal.unnes.ac.id/sju/jih/article/view/59178>
- Shaleha, P. U., Selviana, A., & Muharman, I. (2024). Sejarah perkembangan kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru dan pengaruh krisis moneter terhadap perekonomian Indonesia. *Analisis Sejarah*, 14(2), 41–46. <https://doi.org/10.25077/jas.v14i2.124>
- Shodiq, A., & Maula, F. L. (2025). Paradigma perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(1), 698–713. <https://doi.org/10.46576/bn.v8i1.5644>
- Soesilo, N. I. (2000). *Dinamika pengelolaan ekonomi Indonesia: Sejarah kebijakan dan perkembangannya*. Badan Penerbit FEUI.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi ke-2)*. Alfabeta.
- World Bank. (2020). *Indonesia overview*. <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview>

